

Dari Integrasi Menuju Disintegrasi: Timor Timur 1976-1999

Mila Agustina , Tri Yuniyanto, Akhmad Arif Musadad
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Corresponding Author: milaagustina@student.uns.ac.id

ABSTRACT

East Timor was integrated with Indonesia from 1976 to 1999. Its integration with Indonesia was motivated by the decolonization process of the colony, which did not align with the wishes of the East Timorese people. The issuance of the UN Resolution led to the Portuguese colonial government granting decolonization policies, granting freedom to establish political parties. This freedom of party formation did not lead to peace in East Timor, but rather to increasingly visible divisions. Differences in views on the future, the desire for integration with Indonesia and the desire to establish an independent state, were factors contributing to the civil war. The research method used was historiography. The researcher used data collection techniques through document analysis and literature review. The researcher found that during the integration process, there was public awareness of the unpreparedness to establish an independent state. The disintegration of East Timor was problematic, including public dissatisfaction with development in the region and attacks from pro-independence groups. Ultimately, this study recommends that readers consult other sources to gain a better understanding of the history of East Timor's integration and disintegration.

Keywords: integration, disintegration, East Timor

ABSTRAK

Timor Timur merupakan wilayah yang pernah berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1976-1999, bergabungnya dengan Indonesia dilatakanlakangi adanya proses dekolonisasi wilayah jajahan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Timor Timur. Keluarnya Resolusi PBB menyebabkan koloni Portugis memberikan politik dekolonisasi dengan diberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik, dengan diberikannya kebebasan pembentukan partai tidak membuat situasi di Timor Timur damai akan tetapi perpercahan semakin terlihat jelas, perbedaan pandangan untuk masa depan adanya keinginan untuk berintegrasi dengan Indonesia dan adanya keinginan untuk mendirikan negara merdeka merupakan faktor penyebab munculnya perang saudara. Metode penelitian yang digunakan adalah historiografi peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen, dan studi pustaka. Peneliti menemukan dalam proses Integrasi terdapat kesadaran masyarakat mengenai ketidaksiapan untuk mendirikan negara merdeka dan Disintegrasi Timor Timur terdapat permasalahan yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya, serta adanya serangan dari kelompok pro-kemerdekaan. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada para pembaca untuk membaca sumber lain juga, agar lebih maksimal dalam mengetahui sejarah integrasi dan disintegrasi Timor Timur.

Kata Kunci: integrasi, disintegrasi, Timor Timur

PENDAHULUAN

Berakhirnya Perang Dunia II dunia Internasional harus berhadapan dengan kolonialisme Portugis di wilayah Timor Timur, PBB mengeluarkan petisi mengenai penjajahan merupakan salah satu pengingkaran hak asasi manusia (Syahbuddin, 2020: 112). Dekolonisasi diberikan kebebasan untuk mendirikan partai dengan tujuan nasib masa depan di tangan masyarakat Timor Timur, partai politik berdiri UDT, Fretilin, Apodeti, Trabahista, KOTA persaingan antar partai mulai terlihat karena adanya perbedaan pendapat untuk mewujudkan masa depan Timor Timur, adanya keinginan untuk menjadikan negara merdeka dan ada keinginan untuk melakukan integrasi dengan Indonesia (Subroto, 1997: 21). Kondisi didalam negara Portugis yang tidak stabil akibat dari ketidakpuasan militer Portugis menyebabkan Revolusi Anyelir serta memberikan dampak terhadap wilayah koloni, kurangnya perhatian mengenai proses dekolonisasi membuat antar partai di Timor Timur bersaing untuk memperoleh suara, partai Fretilin dan UDT berkoalisi untuk mendapatkan kemerdekaan akhirnya berpisah karena perbedaan ideologi Fretilin disara menganut ideologi komunis serta keinginan dalam pemindahan kekuasaan dilakukan secara cepat sedangkan UDT anti dengan ideologi komunis dan menginginkan perpindahan kekuasaan secara bertahap (Sulpina, 2023: 12).

Pembendungan ideologi komunis dilakukan oleh partai UDT dengan melakukan gerakan Anti-komunis dan mengkudeta wilayah kota Dili (Cruz, 1999: 69). Fretilin tidak terima akan kudeta yang dilakukan UDT mereka meminta bantuan kepada Portugis untuk diberikan bantuan senjata untuk melakukan serangan terhadap kepemilikan UDT di Dili (Ricklefs dalam Nisfi 2023: 15). Setelah berhasil menduduki Portugis partai Fretilin memproklamasikan kemerdekaan dalam satu pihak pada 28 November 1975 partai lain tidak merespon dengan baik karena mendirikan negara bukan hal mudah, mereka berkeinginan untuk melakukan integrasi dengan Indonesia yang diprakarsai oleh adanya Deklarasi Balibo pada 30 November 1975 (Soekanto, 1976: 426).

Pengintegrasian Timor Timur kedalam wilayah Indonesia dilakukan berdasarkan rasa senasib dan pengakuan atas wilayah yang terpisah karena adanya koloni, Pemerintah Indonesia melalui Majelis Rakyat dalam menanggapi keinginan rakyat Timor pada tanggal 31 Mei 1976 dengan cara para pemimpin partai UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabahista meminta masyarakat membuat petisi integrasi yang ditandatangani oleh ketua Pemerintahan Sementara Timor Timur dan Ketua DPRD (Koran Berita Yudha 1983 Januari 19 hlm 01). Petisi diserahkan kepada Presiden Soeharto pada tanggal 7 Juni 1976 untuk tindak lanjut mengenai proses integrasi pada tanggal 1 Juli 1976 pemerintah menyiapkan rancangan undang-undang untuk penyatuhan Timor Timur kedalam wilayah tingkat I Republik Indonesia secara resmi Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976 (Noor, 1997: 23).

Selama dalam kesatuan Indonesia Timor Timur mulai dilakukan pembangunan mulai dari pendidikan, perekonomian, sosial budaya karena pada masa koloni Portugis mereka tidak mendapat perhatian dalam hal tersebut, angka buta huruf tinggi, angka kesehatan menurun, dan kurangnya inovasi dalam mengolah hasil panen. Sehingga pada masa integrasi pemerataan pembangunan dilakukan mulai dari penyediaan Sekolah Dasar sampai Universitas, Penyediaan Pasar, Perbaikan jalan agar mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan (Koran Harian Neraca, 1988 Februari 8: 5). Pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia dinilai kurang oleh

masyarakat Timor Timur ditambah lagi dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1998 yang menyebabkan mundurnya Presiden Soeharto menyebabkan pemberontakan di Timor Timur (Anwar, 2003: 102).

Pemberontakan di Timor Timur tidak hanya terjadi karena faktor krisis ekonomi akan tetapi juga pelanggaran HAM dengan dugaan Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku utama, walaupun sudah bergabung dengan Indonesia akan tetapi kelompok pro-kemerdekaan masih melakukan pergerakan agar tercapainya keinginan untuk menjadi negara Timor Timur dengan menarik militer Indonesia dari wilayah mereka (Nicholson, 2001: 38). Presiden Habibie sebagai pengganti Soeharto memberikan pilihan untuk Timor Timur mengenai otonomi luas, PBB turut membantu dalam permasalahan ini, mereka memberikan jajak pendapat untuk penentuan nasib masa depan Timor Timur melalui organisasi UNAMET (Anwar, 2003: 197). Pelaksanaan jajak pendapat dilakukan 30 Agustus 1999, pengumuman hasil dari jajak pendapat diumumkan pada 4 September 1999 dengan keinginan masyarakat Timor Timur mendirikan negara sendiri dan berpisah dari Indonesia (Madjiah, 2002: 66).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menerapkan metode sejarah (historis). Menurut Gilbert dalam Daliman (2012:27), mengartikan metode sejarah merupakan kesatuan asas dan aturan sistematik dengan tujuan untuk membantu efektivitas pengumpulan sumber sejarah. Gottschalk dalam Daliman (2012:28), metode penelitian sejarah sebagai teknik untuk membuktikan serta menganalisis secara mendasar, kisah sejarah dapat dipercaya. Pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan analisis dokumen. Studi pustaka dengan melakukan pembedahan buku satu dengan yang lain, analisis dokumen dengan melakukan analisis koran di Monumen Pers.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis Timor Timur

Timor Timur diapit dua benua yakni Asia dan Australia sehingga letak wilayahnya strategis. Wilayah Timor Timur terletak di garis bujur 123° dan 9° garis lintang selatan dengan luas wilayah 14.609.375 KM² terbagi menjadi empat bagian wilayah yakni : daratan Timor Timur 13.670.000 Km², Ambenu 778 Km², Pulau Atauro 150.000 Km², Pulau Jaco 11.250 Km² (Zuhdi, 1994 : 1). Wilayah Timor Timur tanahnya berupa lapisan kapur, karang dan juga tanah liat musim kemarau di wilayah ini berlangsung selama lima bulan terjadi mulai Mei sampai September dan musim hujan berlangsung selama tujuh bulan terjadi mulai Oktober sampai April (Wardayanti, 2021).

Pergantian cuaca dari hujan ke musim kemarau menyebabkan ketidaksesuaian pada kehidupan tanaman untuk ketersediaan air sehingga hal ini berpengaruh pada ketidakamanan pangan diperkirakan berkisar pada 64-70% Hasil panen rendah di Timor Timur berkaitan dengan kondisi alam tanah buruk, beban gulma tinggi serta lereng yang curam dan adanya variasi curah hujan sehingga untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk dilakukan impor dari negara luar (Organization, 2024).

Integrasi Timor Timur ke Dalam Wilayah NKRI

Perang saudara terjadi akibat gagalnya dekolonialisasi yang dilakukan oleh Portugis karena tidak memiliki konsep pasti untuk wilayah jajahan, Timor Timur hanya diberikan janji untuk pengembalian hak sipil, demokrasi dan kebebasan dalam membentuk partai Politik (Anwar, 2003: 22). Keadaan di

berbagai wilayah Timor Timur mulai panas karena UDT dan Fretelin sama memiliki dukungan dari Angkatan Bersenjata yang terpecah menjadi tiga kelompok, Apodeti juga diperebutkan oleh UDT dan Fretelin akan tetapi tidak berani untuk mengajak karena adanya Konsultan dari Republik Indonesia di Dili (Soekanto, 1976: 206). Pada awalnya Apodeti memilih sikap netral akan tetapi setelah melihat terjadi perang antara pribumi dengan orang kulit putih Apodeti memilih untuk berkoalisi dengan Fretelin dengan tujuan menghancurkan UDT dan markasnya di Palapaca dan Farol (Tomodok, 1976: 271).

Penyerangan oleh UDT ini juga didasari rasa cemburu karena Apodeti bergabung dengan Fretelin. Pada tanggal 19 Agustus komisi tentara mulai memasuki kota Dili arah keluar masuk penuh dengan penjagaan mereka juga memblokir akses UDT jaringan listrik tidak berfungsi dikarenakan mereka mengeringkan turbin listrik wilayah UDT dihujani tembakan mortir, peluru senapan dan senjata tajam, tidak hanya diam UDT membalas dengan cara membakar rumah rakyat (Tomodok, 1976: 275). Kudeta ibukota Dili oleh UDT sempat melakukan penawanahan kepada pemimpin Fretelin dan setelah itu dilepaskan pada 11 Agustus 1975 UDT melakukan aksi akan tetapi geraknya tidak terarah dan belum memiliki kecakapan untuk memanfaatkan situasi, pemutusan jaringan antar komando dengan bawahan merupakan strategi bagus untuk mengalahkan Fretelin akan tetapi tidak berhasil (Soekanto, 1976: 212).

Perang saudara semakin tidak karuan mulai bulan September sampai Oktober hal ini berdampak pada migrasi masyarakat Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia menurut survei pada tanggal 6 September 1975 dari Timor Timur di wilayah Indonesia mencapai 20.000 (Soekanto, 1976: 243-246). Pada tanggal 28 November 1975 Fretelin menyatakan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Lorosae dilakukan di Gedung pemerintah pusat dengan diadakan upacara pada sore hari dengan dihadiri 2.000 orang sipil tidak terlalu banyak yang datang karena di luar ibukota masih terjadi kontak senjata (Arajuo, 2014: 31). Proklamasi kemerdekaan secara sepihak oleh Fretelin tidak mendapat respon baik dari empat partai lain yang kemudian respon atas tindakan tersebut keempat partai melakukan Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975 yang berisi atas nama rakyat Timor Timur ingin memproklamasikan integrasi ke negara kesatuan Republik Indonesia, deklarasi ini dilakukan di wilayah Balibo (Tomodok, 1976: 307).

Pada 7 Desember 1975 pasukan Indonesia berhasil mendarat di Dili untuk melakukan Operasi yang dikenal dengan nama Operasi Seroja dengan anggota Kopassanda dari divisi Brawijaya dan juga Siliwangi dengan pemimpin Jenderal L.B Moerdani dan Brigjen Dading Kalbuadi (Subroto, 1996: 116). Operasi bantuan dari Indonesia berdampak pada kekalahan Fretelin yang kemudian meninggalkan kota Dili dengan cara bergerilya ke pegunungan partai pro integrasi UDT, Apodeti, KOTA, Trabalhista membentuk pemerintahan sementara dengan kebulatan tekad untuk bergabung dengan Indonesia (Soekanto, 1976: 382).

Rancangan Undang-Undang Pada tanggal 1 Juli 1976 sudah disahkan menjadi Undang-Undang mengenai penyatuhan Timor Timur kedalam Negara Republik Indonesia wilayah Tingkat I dan pada tanggal 17 Juli 1976 Presiden Soeharto menandatangani Undang-Undang No.7 tahun 1976 mengenai pernyataan Timor Timur merupakan bagian dari Indonesia (Noor, 1997: 23). Selama berada di Republik Indonesia pembangunan di Timor Timur menjadi

poin utama bagi pemerintah Indonesia karena dengan ini akan timbul kemakmuran.

Kondisi Selama Berada di Kesatuan Republik Indonesia

Bidang Pemerintahan

Masyarakat diberikan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan melalui berbagai lembaga pendidikan baik di dalam wilayah maupun di luar wilayah Timor Timur (Chaniago, 1988: 88). Provinsi ke-27 Indonesia diberlakukan pemerataan dengan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat dalam tingkat provinsi dan di kabupaten di Timor Timur juga dilaksanakan pemilihan umum pada 4 Mei 1982 dengan diikuti oleh masyarakat yang memiliki hak pilih sejumlah 311.375 (Koran Berita Yudha, 1982 Maret 11 hlm 04).

Untuk membantu tugas gubernur dilaksanakan pemilu di wilayah Timor Timur yang bersamaan dengan pemilu di Indonesia akan tetapi dikhususkan provinsi ke 27 ini hanya untuk pemilihan wakil rakyat tingkat pusat dan provinsi di tingkat provinsi wakil rakyat ini memiliki tugas untuk memberikan persetujuan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta untuk mengelola daerah secara baik dan teratur (Koran Suara Karya, 1980 Februari 21 hlm 03). Pembangunan terus dilakukan di Timor Timur seiring keamanan sudah stabil pemerintah RI juga memberikan pengampunan terhadap kelompok pemusuh Indonesia dengan memberikan kebebasan bagi yang tidak ingin tinggal di Timor Timur (Kepres No. 63 Tahun 1977).

Bidang Ekonomi

Dalam Bidang ekonomi kebijakan untuk meningkatkan pendapatan rakyat dilakukan dengan menyiapkan Koperasi, pemanfaatan bank dan intensifikasi pertanian dengan tujuan untuk memberikan suntikan dana kepada masyarakat dan adanya kursus untuk mendukung keterampilan serta pelatihan agar masyarakat tidak hanya fokus dalam bidang pertanian, akan tetapi juga memiliki potensi untuk mengembangkan bakat mereka (Basri, 1995: 101). Dibangunnya pasar dengan tujuan agar mempermudah transaksi jual beli produk masyarakat (Sastrowignyo, 1995: 30). Pertanian merupakan prioritas bagi pembangunan daerah Timor Timur mata pencarian sebagian besar penduduk adalah petani hasil pertanian milik masyarakat di Bahu berupa beras, jagung, kacang, umbi, dan buah-buahan (Mubyarto, 1982: 15).

Bidang Pendidikan

Pada masa pemerintahan Portugis rakyat Timor Timur tidak mendapat perhatian dalam bidang pendidikan akan tetapi pada saat berintegrasi dengan Indonesia pendidikan sangat diperhatikan, Gubernur Mario Viegas mengakui adanya pertumbuhan dan perkembangan pendidikan secara kuantitatif dengan ditunjang adanya keinginan dari anak-anak untuk belajar (Zuhdi, 1994: 110). Pada tahun 1976 sekolah dasar di Timor Timur terdapat 47 dengan jumlah murid 13.501 dan 2 SLTP dengan murid 315 dan mulai tahun 1976 sampai dengan 1982 dilakukan rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar dengan persentase usia sekolah 7-12 tahun, Pada masa awal pemerataan pendidikan terdapat permasalahan mengenai tenaga pendidik dan jangkauan anak didik yang berada di daerah terpencil sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Koran Harian Neraca, 1988 Februari 8 hlm 5).

Disintegrasi Timor Timur

Penyimpangan pemerintah orde baru menyebabkan permasalahan multidimensional, masalah yang menjadi perhatian dunia salah satunya mengenai Timor Timur (Koran Berita Yudha, 1977 Juli 21 hlm 03). Lengsernya

pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Presiden B.J Habibie permasalahan status Timor Timur diharapkan mendapat kejelasan. Kesejahteraan, Keadilan, Kesehatan, Pendidikan serta sarana transportasi kurang terpenuhi membuat masyarakat Timor Timur memiliki keinginan untuk merdeka (Burton, 1990: 36-38). Kelompok pro-kemerdekaan terdiri atas organisasi Republik Demokratik Timor Timur, Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur, Forum Sarjana Pro Referendum Bagi Timor Leste, Organisasi Pemuda Timor Leste, Organisasi Perlawan Mahasiswa Timor Leste untuk menjelaskan kondisi pada masyarakat Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor Leste melakukan perjalanan di seluruh penjuru wilayah Timor Timur untuk melakukan perbincangan dengan masyarakat desa serta mendengarkan keluhan tanpa peduli dengan adanya batasan militer, keinginan masyarakat adalah untuk menarik kembali Tentara Nasional Indonesia serta memberikan referendum untuk wilayah Timor Timur (Nicholson, 2001: 38).

Pada 12 November 1991 terjadi pelanggaran HAM yang terjadi di pemakaman Santa Cruz pada saat mengikuti prosesi pemakaman Sebastio Gomez seorang pemuda Timor Timur yang mencari tempat aman untuk berlindung dari serangan militer Indonesia akan tetapi beliau tetap dibantai dengan tembakan tepat di arah perut (Indrawan, 2015: 174). Peristiwa pelanggaran HAM mencuri perhatian dunia internasional Menurut Mary Robinson seorang komisioner Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentara Nasional Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur setelah dilakukan jajak pendapat pada 30 Agustus 1999 tidak hanya melakukan pelanggaran HAM tetapi juga ikut memberi senjata kelompok milisi pro integrasi (Robinson, 1999: 67).

Pemberian otonomi diberikan agar masyarakat Timor Timur dapat merasakan pilihannya sendiri mengenai pemimpin daerah dan pemberian otonomi merupakan rasa peduli terhadap Timor Timur Presiden memberikan otonomi secara luas dikarenakan untuk memperoleh pengakuan dari PBB mengenai pengintegrasian wilayah Timor Timur kedalam Indonesia (Anwar, 2003: 33). Komisi Perdamaian Stabilitas bentukan TNI dan Komnas HAM berhasil mengajak anggota perwakilan partai Fretilin, anggota kelompok pro-integrasi, Tentara Nasional Indonesia, Komnas HAM, serta perwakilan dari pemerintahan Republik Indonesia dan wakil dari UNAMET, komisi yang bertugas untuk memberikan keamanan untuk kelompok apapun dan pada tanggal 18 Juni 1999 berhasil untuk memberikan fasilitas dalam kesepakatan antara Concelho Nacional Resistencia Timorense dan kelompok Falintil setuju dalam melakukan Jajak Pendapat di Timor Timur (Anwar, 2003: 197).

Pemungutan Suara pada tanggal 30 Agustus 1999 diikuti 600.000 orang Timor berada dalam satu wilayah dan 300.000 orang Timor Timur yang berada di luar pulau dan luar negeri tiga kesepakatan yang berhasil dilakukan yaitu: Pertama persetujuan antara Republik Indonesia dengan Portugis mengenai permasalahan Timor Timur, Kedua persetujuan mengenai penentuan pendapat di Timor Timur, Ketiga persetujuan mengenai modal dalam menentukan pendapat rakyat melalui pemungutan suara (Andrianto, 2013: 116). Hasil dari Jajak pendapat pada 4 September 1999 sejumlah 78,5% setara dengan 344.580 rakyat menolak adanya otonomi khusus, dan 21,5% setara dengan 94. 388 menerima adanya otonomi khusus hasil ini menunjukkan bahwa rakyat Timor Timur ingin merdeka dan berpisah dari Indonesia (Madjiah, 2002: 66).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut. Pertama, terkait Resolusi PBB 1514 mengenai wilayah jajahan, Portugis mengeluarkan politik dekolonialisasi terhadap wilayah Timor Portugis dengan memberikan kebebasan untuk pembentukan partai politik dan menentukan nasib masa depan sendiri akan tetapi setelah terjadi kekacauan di dalam negaranya yang dikenal dengan Revolusi Bunga Anyelir mengakibatkan proses dekolonialisasi terhambat dan terjadi pengunduran diri Jenderal Spinola yang mengakibatkan kekosongan di Timor Timur dan partai politik yang berdiri memiliki perbedaan pandangan mengenai nasib masa depan partai UDT dan Fretilin berkeinginan untuk Merdeka tetapi berada di bawah Portugis, Apodeti Trabalhista dan KOTA menginginkan integrasi kedalam wilayah Indonesia karena dirasa kemerdekaan belum siap dicapai dengan melihat kondisi ekonomi dan politik yang terjadi perbedaan pendapat ini memberikan kontra antar partai dan mereka saling mencari dukungan massa untuk melancarkan keinginan mereka, antara Partai UDT dan Fretilin yang berkoalisi karena memiliki tujuan sama akhirnya berpisah dengan alasan tujuan kedepan berbeda dan ideologi kedua partai berbeda perbedaan ini menimbulkan konflik perang saudara yang terjadi pada tanggal 20–27 Agustus 1975. Pada tanggal 28 November 1975 terjadi deklarasi kemerdekaan dilakukan oleh Fretilin hal ini tidak didukung oleh partai lain dan mereka melakukan Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975 dengan tujuan untuk berintegrasi dengan Indonesia.

Kedua, pada saat berintegrasi dengan Indonesia dengan secara resmi diterima oleh Presiden Soeharto tanggal 17 Juli 1976 Timor Timur mulai dilakukan pembangunan agar dapat merasakan sarana dan prasarana sama seperti di Indonesia pembangunan mulai dilakukan dari bidang pendidikan dengan menyediakan pembangunan sarana Pendidikan mulai dari SD, SMP, SLTA dan Universitas dilakukan dengan tujuan agar mengurangi angka buta huruf di wilayah Timor Timur khususnya di daerah pelosok, pembangunan sarana ekonomi dengan dibangunnya pasar dan pemberian subsidi pada petani agar dapat menghasilkan panen yang memuaskan, dan ketersediaan pasar ditujukan agar daya beli masyarakat meningkat dan berada dalam satu lingkup sehingga apabila masyarakat membutuhkan barang dapat dibeli di pasar, pemerataan sarana transportasi dengan dilakukan perbaikan jalan mulai dari ibukota Dili sampai dengan pelosok desa dan adanya bus memberikan kemudahan masyarakat untuk pergi baik dalam wilayah maupun luar wilayah.

Ketiga, krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 memberikan penyebab adanya ketidakpuasan masyarakat Timor Timur terhadap pemerintah, dan adanya kelompok pro kemerdekaan yang terus melakukan penyerangan walaupun kondisi sudah berada di dalam negara Indonesia tidak menghiraukan akan hal itu, adanya krisis moneter ini dan lengsernya Presiden Soeharto dan digantikan oleh Presiden Habibie yang memberikan referendum terhadap wilayah Timor Timur memberikan udara segar bagi kelompok pro kemerdekaan karena mereka dapat melancarkan keinginan untuk menjadikan Timor Timur sebagai negara yang Merdeka dan berdiri dikaki sendiri. Adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI juga menjadi pendorong kelompok pro kemerdekaan semakin menggebu untuk segera melakukan kemerdekaan dalam cara apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto. (2013). Peranan Partai Fretilin dalam Kemerdekaan Timor Timur Tahun 1974-1998. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

- Anwar. (2003). Hari-Hari Terakhir Timor Timur: Sebuah Kesaksian . Jakarta: PT. Sportif Media Informasindo.
- Arajuo. (2014). Timor Timur Gagalnya sebuah Diplomasi. Depok: Indie Publishing.
- Basri. (1995). Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Burton. (1990). Conflict Resolution and Provention. New York: St. Martin Press.
- Chaniago. (1988). Timor Timur dalam Gerak Pembangunan . Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Nasional.
- Cruz. (1999). Kesaksian Aku dan Timor Timur. Jakarta: Yayasan Tunas Harapan Timor Timur.
- D, Nicholas. (2001). The Lorikeet Warriors: East Timor New Generation National Resistance 1989-1999. Melbourne: University of Melbourne.
- Indrawan. (2015). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur sebelum Kemerdekaanya dari Indonesia. Jurnal Fisip, 169-190.
- Madjiah, L. (2002). Perginya Si Anak Hilang. Jakarta: Pustaka Utama.
- Mubyarto. (1982). Pengantar Ekonomi Pertanian. Yogyakarta: LP3ES.
- Muthoifin. (2015). Pemikiran Pendidikan Multikultural Ki Hadjar Dewantara. Intizar, 21(2), 299-320.
- Noor. (1997). Lahirnya Timor Timur. Jakarta: BP. Alda.
- Organization. (2024, Juli 18). Global watch GIEWS Timor Leste. From Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa: <https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=TLS>
- Ramadanti, E. C. (2020). Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Pembelajaran IPA. Jurnal Tawadhu, 4(1), 1053-1062.
- Rcklecfs, M. (2005). Sejarah Indonesia Modern (1200-2004). Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Rina Tiya Lestari, E. P. (2018). E-book Interakif. Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 1(1), 71-76.
- Robinson. (1999). Laporan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia tentang Studi di Timor Timur. Swiss: OHCR.
- Sastrowignyo, S. (1995). Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) Terhadap Kehidupan Sosial di Daerah Timor Timur. Dili: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Timor Timur.
- Soekanto. (1976). Integrasi: Kebukatan Tekad Rakyat Timor Timur. Jakarta: Bumi Restu.
- Soekanto. (1976). Integrasi: Kebulatan Tekad Rakyat Timor Timur. Jakarta: Bumi Restu.
- Suandito, B. (2017). Bukti Informal Dalam Pembelajaran Matematika. Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika, 8(1), 13.
- Subroto. (1997). Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sulpina. (2023). Konflik Indonesia Terhadap Timor Leste 1975-1999. Kala Manca, 11-18.
- Syahbuddin. (2020). Proses Dekolonisasi Republik Demokratik Timor-Leste dan Keterlibatan Indonesia. Jurnal Pendidikan IPS, 108-120.
- Tomodok. (1976). Hari-Hari Akhir Timor Portugis. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Trianto. (2007). Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Wardayanti. (2021, Mei 27). Inilah Iklim Timor Leste. From intisari Online: <https://intisari.grid.id/read/032712994/inilah-iklim-timor-leste-kapan-sebaiknya-berkunjung-ke-negara-ini>
- Zuhdi. (1994). Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur. Jakarta: Direktorat Menengah Umum .